

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Meningkatkan program pembangunan di segala bidang sebagai sarana menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan (Bekti, 2015) Pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 77, 2020) tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah platform digital yang terintegrasi untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi keuangan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran, yang memungkinkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengelola keuangan dengan lebih terorganisir, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan aplikasi sistem informasi di sektor pemerintahan daerah menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Salah satu sistem yang banyak diterapkan adalah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam perencanaan anggaran, pelaporan, dan pencairan anggaran. Di Kabupaten Malang, telah mengadopsi aplikasi ini untuk mendukung pengelolaan anggaran terkait program-program tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak hanya membantu pemerintah daerah untuk mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga memberikan manfaat langsung dalam hal efisiensi, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan anggaran. Dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih terpadu dan real-time, yang memungkinkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah pusat, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran secara lebih mudah dan transparan. Oleh karena itu, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien menjadi aspek penting dalam pencapaian tujuan pembangunan yang terintegrasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, penyerapan anggaran mencerminkan sejauh mana suatu instansi mampu mengelola sumber daya keuangan untuk merealisasikan program-program yang direncanakan. Namun, rendahnya penyerapan anggaran sering kali menjadi permasalahan yang memengaruhi kinerja pembangunan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai daerah di Indonesia mulai menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform berbasis teknologi, dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Khususnya pada Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Malang, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan secara optimal sehingga mampu meningkatkan penilaian penyerapan anggaran. Namun, meskipun aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dirancang untuk menyederhanakan proses administratif, laporan dari instansi terkait menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan awal aplikasi ini dengan pencapaiannya di lapangan. Proses pengelolaan keuangan masih memakan waktu yang lama, dan terdapat kendala dalam hal efisiensi penggunaan anggaran serta ketepatan pelaporan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) benar-benar efektif dalam mempercepat proses administrasi dan efisien dalam penggunaan anggaran. Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, khususnya terkait dengan efektivitas dan efisiensi sistem tersebut dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensinya.

Penelitian terkait *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara* yang dilakukan oleh (Alfani & Nasution, 2022) yakni Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD) merupakan sistem berbasis online yang mampu memberikan kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran, dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD) membuat pengolahan Perencanaan serta Penganggaran Daerah dirasa semakin efektif terlihat bahwa pegawai lebih mudah dan cepat dalam pengerjaannya. Sama halnya dengan penelitian *Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai*, dilakukan oleh

(IZZATUL MUSYARRIFA, 2023) menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dilaporkan secara efektif dan efisien dalam pelaporan pengelolaan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel serta dapat mempercepat atau mengefektivitaskan pekerjaan di pemerintahan. Kemudian dengan indragiripenelitian *Efektifitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu*, dilakukan oleh (Aqhni Adisi, 2022) menyatakan hasil dari penelitian ini adalah program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD dinilai sudah cukup efektif, walaupun pada pelaksanaanny aplikasi masih sering terjadi error jaringan, tidak bisa membuat template pada pembuatan pengajuan gaji sehingga penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD masih harus menggunakan aplikasi pendamping pada proses pelaksanaannya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitin terkait *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk*, yang dilakukan oleh (Nanda Dias, 2021) mendapatkan hasil bahwa Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk cenderung masih kurang efektif apabila dilihat dari kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dihasilkan dipastikan tidak akan selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ada sebelumnya dikarenakan pada nomenkaltur program dan kegiatan yang dilaksanakan berubah secara keseluruhan dan juga mempengaruhi output yang dihasilkan dari kegiatan yang akan dilaksanakan perangkat daerah tersebut. Begitu juga dengan penelitian *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru* yang dilakukan oleh (Vitriana & Ahyaruddin, 2022) mendapatkan hasil analisis data yang disimpulkan menggunakan

teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi) dan struktur birokrasi yang belum optimal sehingga berpengaruh pada penggunaan atau implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah belum efektif . Dan satu lagi pada penelitian *Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Bappeda Kota Mataram*, yang dilakukan oleh (Aldy Wibowo et al., 2023) menunjukkan hasil bahwa pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam melakukan proses penatausahaan keuangan daerah yang dinilai belum maksimal karena belum mampu meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu karena dalam pengaplikasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, selain itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki menu-menu atau fitur yang lebih banyak dan kompleks dibandingkan dengan sistem sebelumnya sehingga justru mempersulit pengguna dalam proses mengelola keuangan daerah.

Meski banyak penelitian sebelumnya yang membahas penerapan aplikasi sistem informasi di berbagai instansi pemerintah, penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Tenaga Kerja pada level pemerintahan daerah masih sangat terbatas dan belum ada yang secara komprehensif mengevaluasi kedua aspek tersebut. Beberapa penelitian yang ada lebih fokus pada aspek teknologi dan infrastruktur dalam implementasi sistem informasi pemerintahan, namun belum banyak yang menggali sejauh mana aplikasi tersebut benar-benar meningkatkan kinerja administrasi dan pengelolaan keuangan secara efisien di tingkat daerah.

Selain itu, penelitian yang ada juga menunjukkan ketidak konsistenan dalam hasil temuan, terutama dalam hal evaluasi efektivitas

dan efisiensi aplikasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memang mempercepat proses administratif, namun belum berhasil mengurangi biaya operasional atau meningkatkan transparansi secara signifikan. Di sisi lain, penelitian lain menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum cukup efektif dalam proses pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berfungsi secara optimal di tingkat pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan (gap) tersebut dengan fokus pada analisis yang lebih mendalam mengenai pengaruh aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang?
2. Apakah hambatan yang ditemui dalam proses penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, hasil penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan berikut ini.

1. Mengukur dan menganalisis efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi (SIPD) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
2. Menganalisis hambatan yang terjadi pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori - teori administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan peran teknologi informasi dalam pemerintahan daerah. Dengan mempelajari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran, penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan daerah.
- b. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam konteks penerapan teknologi informasi. Dengan mengkaji penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penelitian ini akan menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem informasi dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan anggaran daerah yang optimal.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori sistem informasi dalam konteks pemerintahan daerah, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Studi ini juga menguji hubungan antara penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan kinerja pengelolaan anggaran, yang memperkaya kajian tentang sistem informasi dalam konteks administrasi pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, untuk menilai sejauh mana penerapan SIPD telah mencapai tujuan yang optimal. Penelitian ini memberikan gambaran tentang keunggulan dan kekurangan sistem yang ada, serta rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar lebih efisien dan efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan.
- b. Penelitian ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah lainnya yang ingin mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan kesuksesan yang mungkin dihadapi selama penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Tenaga Kerja atau instansi pemerintah lainnya, sehingga bisa mempercepat proses adopsi dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di daerah lain.
- c. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dapat lebih efektif dan efisien dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian ini juga dapat memberikan saran terkait pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, serta

peningkatan kapasitas teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan sistem ini.

- d. Salah satu manfaat praktis lainnya adalah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengetahui sejauh mana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memengaruhi pengelolaan keuangan daerah penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kebijakan yang mendukung transparansi dan pencegahan penyalahgunaan anggaran di tingkat pemerintahan pusat.
- e. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi pengelola atau pengembang aplikasi pemerintahan daerah untuk mengetahui kelemahan – kelemahan pada aplikasi Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil dari penelitian dapat membantu mereka memperbaiki fungsi aplikasi itu sendiri sehingga lebih mampu menunjang kebutuhan pengelola keuangan untuk lebih mengakomodir kebutuhan informasi keuangan yang dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh lebih optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.